



# WAWASAN NUSANTARA

# DAFTAR ISI

KONSEP DAN URGENSI

DINAMIKA DAN TANTANGAN

ALASAN DIPERLUKAN

ESENSI DAN URGENSI

SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN  
POLITIS

KESIMPULAN DAN SARAN

# KONSEP DAN URGENSI

Wawasan Nusantara dapat dibedakan atas 2 pengertian

Secara Etimologi

Berasal dari kata 'wawasan' (dari kata 'wawas' -bhs. Jawa- yang berarti pemandangan) dan 'nusantara' (gabungan kata 'nusa'-bhs. Sansekerta- yang berarti pulau dan 'antara' -bhs. Latin- yang berarti antara atau dalam kelompok)

Secara Terminologi

- Pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan
- Umumnya istilah menurut para ahli atau tokoh dan Lembaga mengkaji konsep tersebut

# KONSEP DAN URGENSI

## Hasnan Habib

Kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan hankam



## MPR tahun 1998

Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

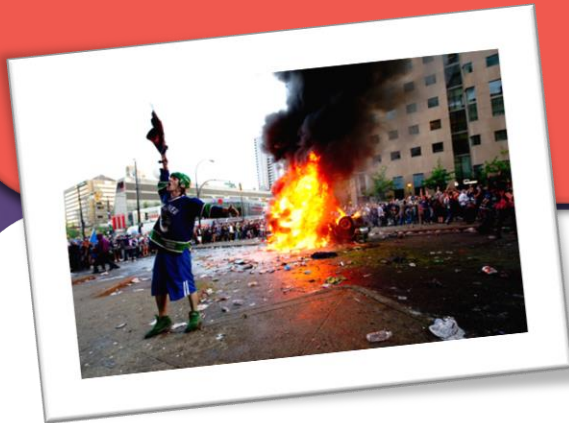
# ALASAN DIPERLUKAN



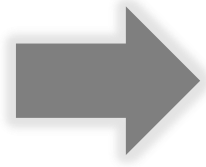
Mengapa Indonesia  
Butuh ?



- Mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh WNI
- Perbedaan persepsi atau pendapat maupun friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis dan demokrasi diharapkan dapat menghasilkan masyarakat dinamis, kreatif, dan sinergis



Bila Tidak Ada ?



- Bangsa Indonesia akan kehilangan cara pandang terhadap wilayahnya sendiri
- Mengakibatkan kekacauan dalam pemerintahan dan pertentangan kepentingan

## SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIS

## Latar Belakang Historis Wawasan Nusantara

### Deklarasi Djuanda

"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-Undang"

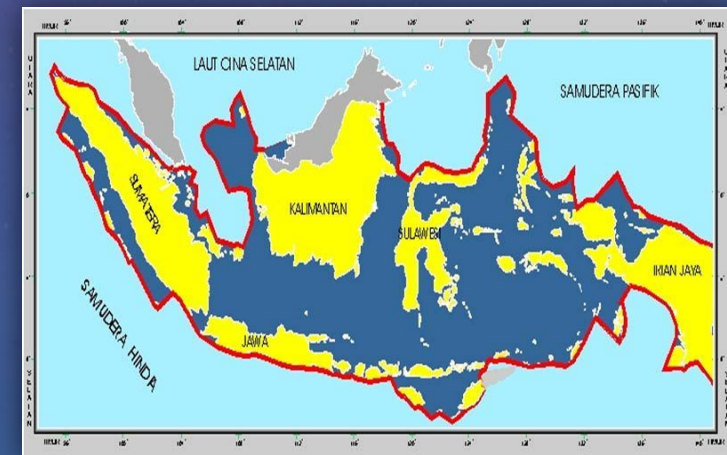


Ir. H. Raden Djoeanda Kartawidjaja

## SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIS

## Latar Belakang Historis Wawasan Nusantara

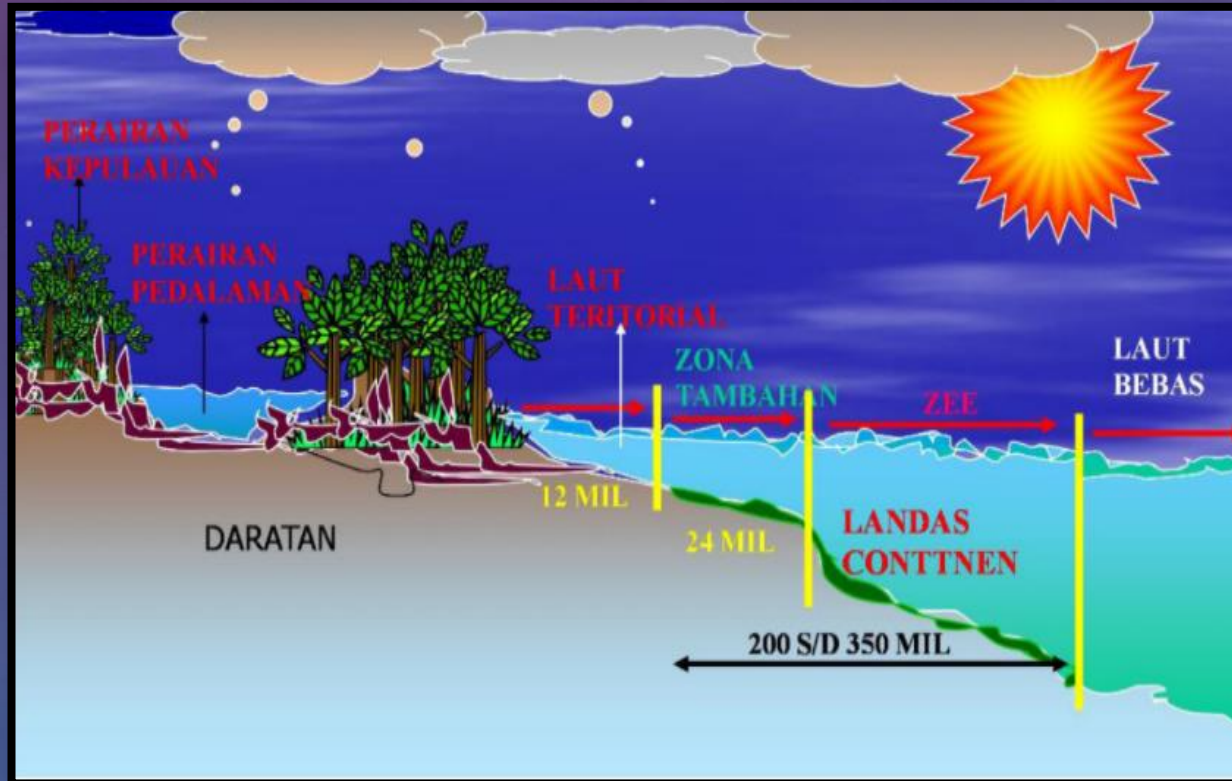
- Isi Pokok:
  - Lebar laut territorial Indonesia 12 mil (dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia)
  - Wilayah Indonesia sekarang telah menjadi satu kesatuan wilayah
  - Laut tidak lagi menjadi pemisah, namun penghubung pulau-pulau
- Sebelum Deklarasi Djuanda, wilayah Indonesia didasarkan pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 (TZMKO 1939) atau 'Ordonansi 1939'
- Menyebabkan pulau-pulau Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan kapal asing bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau



## SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIS

## Latar Belakang Historis Wawasan Nusantara

- Konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat dengan dimasukkannya ke dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945
- Setelah Deklarasi Djuanda dikeluarkan, dibentuk UU No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia
- Pada Konferensi PBB 30 April 1982, diterima dokumen bernama *"The United Nation Convention on the Law of the Sea"* (UNCLOS)





## SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIS

## Latar Belakang Sosiologis Wawasan Nusantara

- Seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara yang berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah kemudian diperluas sebagai pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa
- Dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan terus-menerus untuk mewujudkan persatuan bangsa
- Semangat kebangsaan Indonesia dimulai pada peristiwa Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, ditegaskan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan diwujudkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945
- Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan penjajahan yang memecah-belah bangsa melatarbelakangi tumbuhnya semangat dan tekad masyarakat Nusantara untuk bersatu dalam satu nasionalitas dan kebangsaan



## SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIS

## Latar Belakang Politis Wawasan Nusantara

- Kepentingan nasional merupakan turunan dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional

Untuk mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

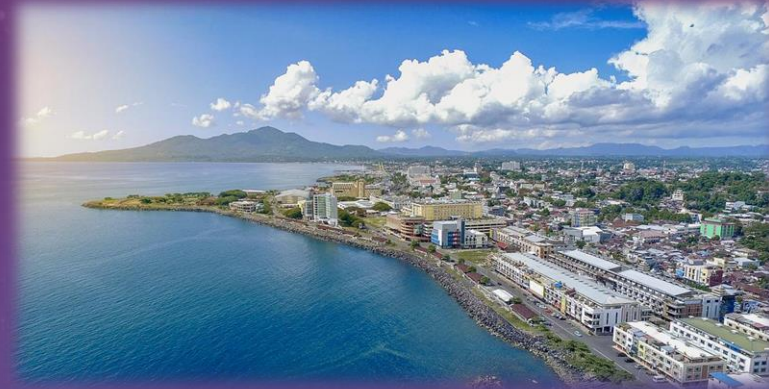
Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara

- Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia

# DINAMIKA DAN TANTANGAN

- Wawasan Nusantara mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan
- Kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan
- Wilayah Indonesia yang begitu luas memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya



- Potensi positif dari suatu daerah perlu digali, diolah, didayagunakan, dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat
- Potensi negatif dari suatu daerah perlu diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat

Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus dilakukan dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang terus berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai perubahan zaman

# ESENSI DAN URGENSI

- Esensi wawasan Nusantara ->  
-> Kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia
- Wawasan Nusantara awalnya adalah konsepsi kewilayahan, kemudian berkembang menjadi konsep kebangsaan -> Tidak lagi hanya berpandangan keutuhan wilayah, tapi persatuan bangsa pula
- Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial-budaya, ekonomi, serta pertahanan-keamanan



# ESENSI DAN URGENSI

## Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

1 Kebulatan wilayah nasional merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa dan menjadi modal dan milik bangsa bersama

3 Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa

5 Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

2 Bangsa Indonesia dengan berbagai suku dan bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya

4 Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya

6 Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum (hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional)

7 Bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial



# ESENSI DAN URGENSI

## Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

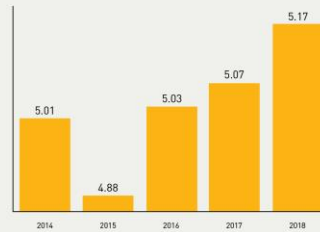
1

Kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air



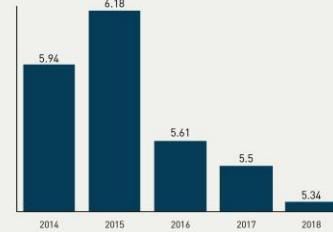
### ECONOMIC GROWTH (%)

Indonesia's economy has accelerated since 2015, despite the country feeling the brunt of global economic slowdown.



### UNEMPLOYMENT RATE (%)

Unemployment rate has also fallen since 2015.



Source: Coordinating Ministry for Economic Affairs

2

Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya

3

Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat



# ESENSI DAN URGENSI

## Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

1

Masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa



2

Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa

# ESENSI DAN URGENSI

## Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

1

Ancaman terhadap salah satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara



2

Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa



## KESIMPULAN

- Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik Negara Indonesia
- Keluarnya Deklarasi Djuanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan berdasarkan hasil keputusan Konvensi PBB tentang *'The United Nation Convention on the Law of the Sea'* (UNCLOS) tahun 1982
- Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan (positif) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian juga mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah

## KESIMPULAN

- Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa
- Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara merupakan perwujudan dari sila III Pancasila, Persatuan Indonesia
- Rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 sampai 1998 dan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia 1945. Menurutnya, Indonesia dijelaskan dari aspek kewilayahannya, merupakan sebuah negara kepulauan (*Archipelago State*) yang berciri nusantara
- Berdasarkan Pasal 25 A UUD NRI 1945 ini pula, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup (*lebensraum*) bagi bangsa Indonesia yang telah menegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, dan pendudukan oleh negara asing

THANK YOU



t h a n k y o u